



**PENETAPAN**  
**Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. DJEFRI OSWARD MAGE**, laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 16 Oktober 1989, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Merpati, RT/RW:004/001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- 2. NOVITA RATNASARI**, Perempuan, lahir di Maumere, tanggal 01 November 1993, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Merpati, RT/RW:004/001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 3 Agustus 2023, dibawah register perkara Nomor: 122/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Masehi Injili Di Timor-Jemaat Kalvari Maumere, pada tanggal 14 Oktober 2015 di hadapan Pendeta Marthen S.T.A. Tubatonu, S.Th;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03112015-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 November 2015;
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage;



4. Bahwa kedua anak dari Para Pemohon di atas, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama Ibu mereka saja yakni Novita Ratnasari, dikarenakan saat kedua anak tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
5. Bahwa anak kesatu atas nama Thivania Lhivia Mage, lahir di Maumere, tanggal 23 Juni 2010, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/LU/ALT/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Juli 2010, dan anak kedua atas nama Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yang lahir di Maumere, tanggal 05 September 2013, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13122017-0114, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 23 September 2019;
6. Bahwa Pemohon Djefri Oswald Mage adalah ayah biologis dari anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran ketiga anak atas nama Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage juga dicantumkan nama ayah mereka yakni Djefri Oswald Mage guna kepentingan mengurus ijazah dan melanjutkan sekolah bagi sang anak;
8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak kesatu atas nama Thivania Lhivia Mage, lahir di Maumere, tanggal 23 Juni 2010, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/LU/ALT/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Juli 2010, dan anak kedua atas nama Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yang lahir di Maumere, tanggal 05 September 2013, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13122017-0114, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 23 September 2019, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Djefri Oswald Mage dengan Nomor Induk Kependudukan 5307051310890005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita Ratnasari dengan Nomor Induk Kependudukan 5307054111930002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 716 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-03112015-0002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 04 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307151911110002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 31 Oktober 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 251/LU/ALT/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13122017-0114 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi JOHN FERDI**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi mengetahui adanya permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran Anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage;
- Bahwa Orang tua biologis dari Anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yang saksi tahu adalah saudara Djefri Oswald Mage selaku Bapak dan saudari Novita Ratnasari selaku Ibu ;
- Bahwa Dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama Pemohon Djefri Oswald Mage karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon I Djefri Oswald Mage dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Anak Thivania Lhivia Mage lahir di Maumere, tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa Anak Eklesio Vlaneo Ozhi Mage lahir di Maumere, tanggal 5 September 2013;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perkawinan secara agama kristen di depan pemuka agama PDT. Marthen S. T. A. Tubatonu, S. Th, tanggal 14 Oktober 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung oleh karena itu agar ditambahkan nama Djefri Oswald Mage selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



2. Saksi **MARIA WASIANI TATI**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai ibu kandung dari pemohon II, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Orang tua biologis dari Anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yang saksi tahu adalah saudara Djefri Oswald Mage selaku Bapak dan saudari Novita Ratnasari selaku Ibu ;
- Bahwa Dalam akta kelahiran anak tidak dicantumkan nama Pemohon Djefri Oswald Mage karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon I Djefri Oswald Mage dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Anak Thivania Lhivia Mage lahir di Maumere, tanggal 23 Juni 2010;
- Bahwa Anak Eklesio Vlaneo Ozhi Mage lahir di Maumere, tanggal 5 September 2013;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 melangsungkan perkawinan secara agama kristen di depan pemuka agama PDT. Marthen S. T. A. Tubatonu, S. Th, tanggal 14 Oktober 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tujuan permohonan karena pada dokumen kependudukan Anak Thivania Lhivia Mage dan Eklesio Vlaneo Ozhi Mage yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon 1 selaku Bapak Kandung oleh karena itu agar ditambahkan nama Djefri Oswald Mage selaku ayah kandung dalam kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **Anak**

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I **DJEFRI OSWARD MAGE** dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** Nomor 215/LU/ALT/2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** Nomor 5307-LT-13122017-0114 tertanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi JOHN FERDI** dan **Saksi MARIA WASIANI TATI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon serta **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** bertempat tinggal di Jln. Merpati, RT/RW:004/001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi JOHN FERDI dan Saksi MARIA WASIANI TATI** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 14 Oktober 2015 pada Gereja Masehi Injili Di Timor-Jemaat Kalvari Maumere di dihadapan Pendeta Marthen S.T.A. Tubatonu, S.Th dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 4 November 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi JOHN FERDI dan Saksi MARIA WASIANI TATI** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE dan ANAK EKLESIO VLNEO OZHI MAGE** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE dan Anak EKLESIO VLNEO OZHI MAGE** Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-4, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi JOHN FERDI dan Saksi MARIA WASIANI TATI** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307151911110002 atas nama Kepala Keluarga **DJEFRI OSWARD MAGE** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Oktober 2018 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE dan Anak EKLESIO VLNEO OZHI MAGE** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE dan Anak EKLESIO VLNEO OZHI MAGE** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni **NOVITA RATNASARI**, hal ini dikarenakan **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama*

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”, hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;*

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 2(dua) orang anak bernama **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLANEO OZHI MAGE** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 14 Oktober 2015 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 4 November 2015 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme



anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** lahir di Maumere, pada tanggal 23 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 215/LU/ALT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 26 Juli 2010 dan **Anak EKLESIO VLNEO OZHI MAGE** lahir di Maumere, pada tanggal 5 September 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-13122017-0114 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 September 2019 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon **DJEFRI OSWARD MAGE** dan **NOVITA RATNASARI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **Anak THIVANIA LHIVIA MAGE** dan **Anak EKLESIO VLNEO OZHI MAGE**

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp224.500,00(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 122/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ANTONIA L OLA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONIA L OLA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK .....         | : | Rp100.000,00; |
| 3.....B                    | : | Rp4.500,00;   |
| iaya Penggandaan .....     | : |               |
| 4. P                       | : | Rp20.000,00;  |
| NBP Panggilan Pemohon      |   |               |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah .....		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....		
Jumlah	:	<u>Rp224.500,00;</u>
(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)		